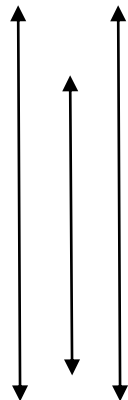


CALK

(CATATAN AKHIR LAPORAN KEUNGAN)



KECAMATAN IV JURAI

KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Maksud dan Tujuan.....	4
1.2. Landasan Hukum.....	5
1.3. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA	7
2.1. Ekonomi Makro.....	7
2.2. Kebijakan Keuangan.....	7
2.3. Pencapaian Target Kinerja.....	8
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....	9
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	9
3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja.....	11
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	12
4.1. Enitas Akuntansi dan Enitas Pelaporan Keuangan.....	12
4.2. Basis Akuntansi.....	13
4.3. Basis Pengukuran.....	14
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi.....	14
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....	16
5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos.....	16
BAB VI PENUTUP	
6.1. Kesimpulan.....	22
6.2. Saran.....	22

BAB I

PENDAHULUAN

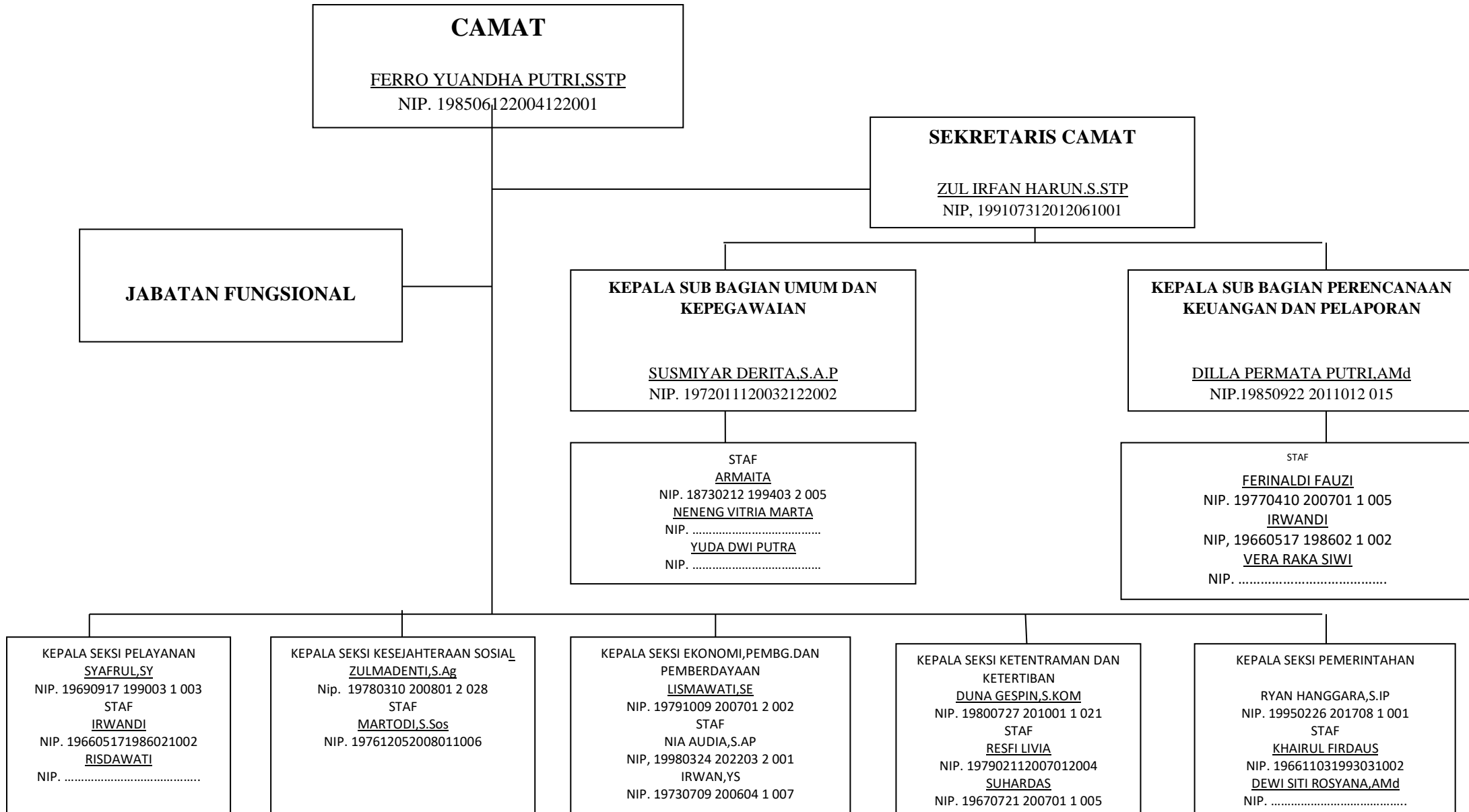
Kantor Camat IV Jurai Kabupaten Pesisir selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan susunan organisasi, Tugas Pokok Fungsi tata kerja dan Uraian Tugas Jabatan struktural di Lingkungan Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, Kantor Camat IV Jurai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Pesisir Selatan.

Kantor Camat IV Jurai dipimpin oleh seorang Camat (Eselon IIIa), dibantu oleh seorang Sekcam merupakan Pejabat Struktural Eselon IIIb, 5 (lima) orang Pejabat Struktural Eselon IV/a dan 2 (dua) orang Pejabat Struktural Eselon IV/b, yaitu:

1. Sekretariat yang membawahi 2 (dua) Sub Bagian, yaitu:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan Pelaporan dan Keuangan
2. Seksi Pemerintahan
3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
4. Seksi Kesejahteraan Sosial
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian
6. Seksi Pelayanan

Struktur Organisasi Kantor Camat IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 56 tahun 2016:

**STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CAMAT IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan kepada stakeholder, mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan di Kecamatan IV Jurai. penyusunan Laporan Keuangan adalah upaya kongkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah. Untuk mewujudkan hal tersebut maka disampaikanlah laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu dalam bentuk Laporan Keuangan yang setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Keuangan disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang direvisi menjadi PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Pada Rancangan Peraturan daerah tentang Laporan Keuangan Pemerintah daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai Kinerja Instansi Pemerintah yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna Anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Pengungkapan informasi tentang kinerja ini relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (output) dari setiap kegiatan dan hasil (outcome) dari setiap program. Untuk keperluan tersebut, perlu disusun suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut sekaligus dimaksudkan untuk menggantikan ketentuan yang termuat dalam Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga dapat dihasilkan suatu Laporan Keuangan dan Kinerja yang terpadu.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- b. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- d. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- e. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- f. Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- j. Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
- k. Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Selatan Nomor 125 Tahun 2011 tentang APBD
- l. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 161 tahun 2011 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan.

1.3 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan penyusunan catatan atas laporan keuangan ini terdiri dari 6 (enam) bab, setiap bab secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Sistematika Penulisan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Pencapaian Target Kinerja

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1 Enitas Akuntansi dan Enitas Pelaporan Keuangan
- 4.2 Basis Akuntansi
- 4.3 Basis Pengukuran
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1 Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos

BAB VI PENUTUP

- 6.1 Kesimpulan
- 6.2 Saran

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1 Ekonomi Makro

Memuat Penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan dalam penyusunan/ pengusulan unit kerja dalam APBD, perkembangannya dalam perubahan APBD sampai dengan pelaksanaan akhir tahun anggaran APBD.

Sesuai dengan Tugas Pokok dalam Penyelenggaraan Pemerintah di kecamatan, Kantor Camat IV Jurai diharuskan mampu menyelenggarakan kewenangan urusan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan langkah :

- a. Melakukan Pelayanan Kepada Masyarakat dengan menerapkan Sistim Pelayanan Minimal
- b. Meningkatkan keahlian aparatur keuangan dan tenaga kepegawaian
- c. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan pemerintahan Nagari
- d. Meningkatkan Pelayanan administrasi Pelayanan.

2.2 Kebijakan Keuangan

Memuat penjelasan mengenai kebijakan keuangan yang ditetapkan pemerintah daerah yang berimplikasi terhadap pelaksanaan program/ kegiatan unit kerja. Implikasi ini akan terlihat pada Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca unit kerja, dan diperbandingkan dengan periode tahun sebelumnya.

Kebijakan keuangan yang diambil yaitu kebijakan aspek belanja, dimana kebijakan di bidang pengeluaran digunakan dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung dengan efisien tanpa

mengurangi kinerja yang telah ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan seperti ;

- Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran OPD
- Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama pada program dan kegiatan yang berdampak besar untuk pelayanan masyarakat.

2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD-OPD

Kecamatan IV Jurai sebagai bagian dari fungsi Pemerintahan Daerah berusaha agar dapat mewujudkan target kinerja sebagai berikut :

- a. Semakin terwujudnya ketepatan, kecepatan, efektifitas, dan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- b. Meningkatnya perbaikan kinerja birokrasi;
- c. Semakin terwujudnya birokrasi yang mengarah kepada *good governance* dan *clean government*;
- d. Semakin terwujudnya birokrasi yang profesional, efektif, efisien dengan budaya kerja yang mengutamakan pelayanan pada masyarakat;
- e. Meningkatnya tolok ukur kinerja dengan berorientasi bukan hanya output kegiatan tetapi sampai pada outcam, manfaat dan dampak;
- f. Meningkatnya fungsi regulasi, fasilitasi, pelayanan, pengendalian, dan pengawasan.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Berisikan penjelasan ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan (efektif dan efisien) dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD Kantor Camat IV Jurai sebagaimana yang dijelaskan pada BAB II huruf 2.3. Penyajian ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan dapat dalam bentuk table atau grafik berikut :

Tabel 1. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Kantor Camat IV Jurai Kabupaten Pesisir selatan :

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	BELANJA (Rp)		
		Anggaran	Realisasi	%
A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.695.713.067,-	1.633.381.076,-	99,9
1	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	1.666.913.067,-	1.606.581.076,-	99,9
2	Penyediaan Adm.Pelaksanaan Tugas ASN	28.800.000,-	26.800.000,-	98,9
B	Administrasi Umum Perangkat Daerah	152.960.714,-	152.793.274,-	99,9
1	Pemyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan banguna Kantor	9.164.049,-	9.164.049,-	100
2	Penyediaan Bahan Logistik kantor	37.742.717,-	37.736.000,-	99,9
3	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	8.051.148,-	8.051.000,-	100
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	1.800.000,-	1.800.000,-	100
5	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96.202.800,-	96.042.225,-	99,9
C	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pem.Daerah	85.129.087,-	82.770.928,-	99,9
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.060.000,-	5.716.440,-	99,9
2	Penyediaan Jasa Pelaksanaan Umum Kantor	79.069.087,-	77.054.488,-	98,0

D	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.110.200,-	42.820.354,-	99,9
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.610.200,-	35.320.354,-	99,9
2.	Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya.	7.500.000,-	7.500.000,-	100
	Jumlah	1.976.913.068,-	1.911.765.632,-	

3.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target

Hambatan dan kendala dalam pencapaian target Karena adanya Refocusing Anggaran yang mengakibatkan berkurangnya anggaran kegiatan tertentu dan adanya perubahan sistem pengelolaan keuangan daerah memerlukan pemahaman lebih bagi aparat pengelola keuangan dan Sistim Informasi Keuangan Daerah yang tidak bisa diakses dari kecamatan yang terkendala jarak dan jaringan sistim informasi di kecamatan yang masih kurang mendukung.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Enitas Akuntansi dan Enitas Pelaporan Keuangan

Enitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan untuk digabungkan dengan enitas pelaporan keuangan. Sedangkan Enitas Pelaporan Keuangan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih Enitas Akuntansi yang berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan). Khusus bagi OPD tidak diwajibkan menyusun Laporan Arus Kas. Laporan Arus Kas disusun oleh PPKD yang dalam hal ini diemban oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).

Pada unit kerja yang dianggap sebagai Enitas Akuntansi adalah Perangkat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang merupakan pejabat pada unit kerja OPD yang melaksanakan satu atau beberapa buah kegiatan dari suatu program sesuai dengan tupoksinya.

Adapun program dan kegiatan TA. 2023 pada Kantor Camat IV Jurai adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Kabupaten/Kota
1	Administrasi Keuangan perangkat Daerah
2	Administrasi Umum perangkat Daerah
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Ada 2 basis akuntansi yang dipakai yaitu Basis Kas (Cash Basic) dan Basis Akruwal (Accrual Basic). Pada Cash Basis pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima dan belanja atau pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas bendaharawan. Basis Kas dipergunakan dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran. Basis Akruwal dipergunakan dalam penyusunan Neraca dimana asset, hutang dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah dan bukan pada saat kas diterima atau kas keluar.

Bagi OPD basis yang mendasari penyusunan laporan keuangan sama dengan basis yang dipakai pemerintah daerah, yaitu basis kas dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Basis Akruwal dalam menyusun neraca.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Menyajikan informasi tentang penerapan kebijakan berbasis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan (asset, kewajiban dan ekuitas dana). Yang harus diungkapkan adalah proses penetapan nilai asset, kewajiban dan ekuitas dana dengan jelas sehingga dapat menggambarkan nilai perolehan historis. Asset harus dicatat/ diukur sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh asset tersebut. Kewajiban dicatat/ diukur sebesar nilai nominal dan ekuitas dana dicatat/ diukur sebesar selisih antara asset dan kewajiban.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi

Menyajikan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan atas pos-pos laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Contoh :

- Pencatatan asset berdasarkan harga perolehan

Telah sesuai standar akuntansi pemerintah

- Terhadap asset daerah belum dilakukan penyusutan

Belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Bagi OPD standar akuntansi yang dipakai sama dengan yang diterapkan pemerintah daerah secara umum. Menyangkut penerapan standar akuntansi ini akan ada penegasan dari Kepala Daerah

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos

a. Belanja

1) Belanja Pegawai

Dianggarkan sebesar Rp. 1.695.713.067,- terealisasi Rp 1.633.381.076,- dengan rincian sebagai berikut ;

Tabel 2. Rincian Belanja Pegawai

RINCIAN BELANJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
Belanja Honor	28.800.000,-	26.800.000,-
Gaji dan Tunjangan	1.177.318.547,-	1.133.921.691,-
Tambahan Penghasilan PNS	489.594.520,-	472.659.385,-
Total Belanja Pegawai	1.695.713.067,-	1.633.381.076.-

2) Belanja Barang dan Jasa

Dianggarkan sebesar Rp. 310.000.001,- terealisasi sebesar Rp. 305.184.556,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Barang dan Jasa	310.000.001,-	305.184.556,-
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor	9.164.049,-	9.164.049,-
3	Penyediaan Bahan Logistik kantor	37.742.717,-	37.736.000,-
4	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	8.051.148,-	8.051.000,-
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	1.800.000,-	1.800.000,-
6	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96.202.800,-	96.042.225,-
7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.060.000.-	5.716.440,-

8	Penyediaan Jasa Pelaksanaan Umum Kantor	79.069.087,-	77.054.488,-
9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemerliharaan,Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.610.200,-	35.320.354,-
10	Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya.	7.500.000,-	7.500.000,-
	Jumlah	310.000.001,-	305.184.556,-

3) Belanja Modal

Dianggarkan sebesar Rp. 0,- terealisasi sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut;

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	N I H I L		

b. Aset

1) Aset Lancar

Kas pada bendahara pengeluaran per 31 Desember 2023 adalah Rp. 0,- karena sisa UYHD per 31 Desember 2023 sebesar Rp.3.288.530,-

Persediaan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 0,- sama dengan persediaan per 31 Desember 2023, yang berarti pengelolaan persediaan sudah sangat baik.

2) Aset Tetap

✓ Tanah

Saldo Awal tanah tahun 2006 sebesar Rp. 83.000.000,- dan sepanjang tahun 2023 tidak ada perubahan saldo tanah.

✓ Peralatan dan Mesin

Saldo awal Peralatan dan Mesin tahun 2017 sebesar Rp. 514.380.109,- Selama TA 2018 tidak ada perubahan sehingga Saldo Peralatan dan Mesin per 31 desember 2023,-tidah ada perubahan,-.

Bangunan dan Gedung

Tidak terdapat perubahan saldo bangunan dan gedung sepanjang TA 2017 Rp.2.129.485.339,- sehingga tetap sama dengan saldo awal tahun 2018,- sebesar Rp.2.129.485.339,- dan saldo pada 31 desember 2022,- sebesar Rp.2.129.485.339,-

✓ Jalan , Irigasi dan Jaringan

Saldo awal tahun 2017 sebesar Rp.13.000.000,- tidak terdapat penambahan mutasi sepanjang tahun 2018. sehingga saldo per 31 desember 2018 sebesar Rp. 13.000.000,- dan tidak terdapat penambahan mutasi sepanjang tahun 2021 sehingga saldo per 31 desember 2023 Rp.13.000.000,-

✓ Aset Tetap Lainnya

Saldo awal tahun 2017 Rp. 629.167,- dan sepanjang tahun 2017 tidak ada perubahan, sehingga saldo per 31 Desember 2018 tetap sebesar Rp. 629.167,- dan tidak terdapat perubahan pada tahun 2021 sehingga saldo per 31 Desember 2023 tetap sebesar Rp. 629.167,-

c. Ekuitas Dana

Ekuitas dana memuat informasi dan penjelasan pos ekuitas dana. Bagi OPD yang ada hanya ekuitas dana lancar. Ekuitas dana lancar berasal dari SILPA. Tapi di tahun 2021 kita mengkaji lebih efektif dan efisien melalui perhitungan surplus/ defisit.

URAIAN EKUITAS DANA	TAHUN 2023 (Rp)	TAHUN 2022 (Rp)
JUMLAH EKUITAS AKHIR 2023	1.887.762.632,-	0,-
Silpa	0,-	0,-
Surplus/ Defisit	0,-	0,-
EKUITAS DANA INVESTASI		0,-
Diinvestasikan dalam asset tetap	0,- 0,-	0,- 0,-
EKUITAS DANA UNTUK DIKONSOLIDASIKAN		
Rk Ppkd	1.887.765.632,-	
Jumlah Ekuitas Dana	1.887.765.632,-	0,-

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari uraian CaLK SKPD Kantor Camat IV Jurai tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa ada sedikit hambatan yaitu adanya Refocusing Anggaran yang mengakibatkan berkurangnya anggaran kegiatan tertentu dan adanya perubahan sistem pengelolaan keuangan daerah memerlukan pemahaman lebih bagi aparat pengelola keuangan dan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang tidak bisa diakses dari kecamatan yang terkendala jarak dan jaringan sistem informasi di kecamatan yang masih kurang mendukung.

6.2 Saran

1. Peningkatan alokasi anggaran untuk tahun-tahun yang akan datang sangat diharapkan untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kualitas sumber daya aparatur kecamatan.
2. Diperlukan sosialisasi dan pelatihan yang lebih intens tentang aturan dan aplikasi pengelolaan keuangan daerah, terlebih bagi aparatur yang masih baru di bidang keuangan.

Salido, 16 Januari 2023

CAMAT IV JURAI



FERRO YUANDHA PUTRI, SSTP
NIP. 19850612 200412 2 001

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan keuangan SKPD Kantor Camat IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistim pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, dimana posisi keuangan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Anggaran Rp 1.976.913.068,-
- Jumlah SP2D Rp. 1.915.054.162,-
- Jumlah Realisasi Rp. 1.911.765.632,-
- Sisa UYHD Rp 3.288.530,-

Salido, 16 Januari 2023


CAMAT IV JURAI
FERRO YUANDHA PUTRI, SSTP
NIP. 19850612 200412 2 001